

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Etika politik menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki dimensi politik serta dapat ditinjau melalui tiga sudut pandang. Pertama adalah manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Kedua, manusia dengan tingkat kesosialannya, dan yang ketiga dimensi politik yang ada pada kehidupan manusia. Makna dari manusia dikatakan sebagai makhluk sosial adalah sebagai sebuah bentuk kesamaan antara satu manusia dengan manusia yang lain dan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Artinya, manusia hanya akan terlihat keberadaannya karena orang lain dan hanya dapat hidup dan berproses juga disebabkan karena adanya manusia yang lain. Haryatmoko (2016) berpendapat bahwa asas politik dinilai sebagai sebuah hal yang ideal dan tidak memberikan contoh kerasnya politik yang sebenarnya (Febriany & Dwi, 2021).

Tantangan partai politik dalam mempertahankan suara yang diperoleh merupakan suatu hal yang cukup sulit. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat dapat dikondisikan oleh suatu kekuatan informasi yang notabene telah berjalan di negara demokrasi. Kekuatan tersebut dapat direalisasikan dengan kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Hal tersebut menjadi satu konsep dari disrupsi, seperti yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. Dijelaskan bahwa kebebasan memilih merupakan suatu hak yang tidak dapat diganggu oleh individu manapun yang mencakup dalam hal agama, politik dan lain sebagainya (Arifki, 2021).

Disrupsi di Indonesia memiliki dampak yang besar terhadap pergerakan dunia politik. Pergerakan politik di Indonesia dinilai lambat laun semakin cepat. Menurut Majid (2020), disrupsi tidak saja dirasakan oleh bagian bisnis maupun ekonomi. Melainkan, sudah mempengaruhi sektor yang lainnya. Salah satu sektor yang ikut merasakan dampak disrupsi adalah sektor politik. Lahirnya partai politik tidak jauh hubungannya dari akar sosial dan politik yang muncul di masyarakat. Terdapat sudut pandang yang menjelaskan mengenai kepentingan, diantaranya adalah

kebutuhan, identitas yang diamankan, kesenangan, dan suatu hal yang dapat memenuhi dari segi material dari seseorang (Barokah et al., 2022).

Partai politik merupakan komponen penting yang harus ada dalam proses berjalannya pemerintahan. Dimana, partai politik menjadi jembatan pemimpin pemerintahan daerah untuk mendaftarkan diri dan bertarung dalam pemilihan umum. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik (2011), pada pasal 1 dijelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi nasional yang dilahirkan oleh sekelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak serta cita-cita yang dapat digunakan untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik para pengurus dan anggotanya, masyarakat, bangsa serta negara, yang juga dapat digunakan untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Musrafiyan et al., 2021).

Partai politik adalah pilar yang vital untuk merealisasikan demokrasi yang baik dan juga kelompok politik menjadi jembatan aspirasi masyarakat. Partai juga sebagai garda paling depan dari sebuah sistem politik yang dihadapkan langsung dengan masyarakat. Partai politik dituntut untuk dapat peka dan merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Organisasi politik harus memiliki sebuah komitmen untuk dapat menjadi pen jembatan yang baik bagi permasalahan lokal. Kelompok tersebut juga dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan agar permasalahan masyarakat tersebut dapat diselesaikan. Karena dari permasalahan masyarakat tersebut akan membangun dan memberi ruang tumbuh bagi para pemimpin politik yang memulai karirnya dari bawah. Dengan demikian atas kesadaran yang ada akan menjadikan partai politik tersebut terdorong untuk mengembangkan meritokrasi yang rasional sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang baik (Kasih, 2018).

Sebagai negara demokrasi partai politik adalah sebuah perangkat penting yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan negara dan bangsa Indonesia serta warga negara Indonesia. Dimana kebebasan untuk berkumpul dan berserikat sudah ditetapkan serta dijamin oleh konstitusi. Hubungan pemilih dengan partai dapat saling mengerti dan memperhatikan apa yang diinginkan antara keduanya. Sehingga elit politik diharuskan memiliki kemampuan untuk menggali informasi mengenai keinginan para pemilih. Pada kompetisi multi-

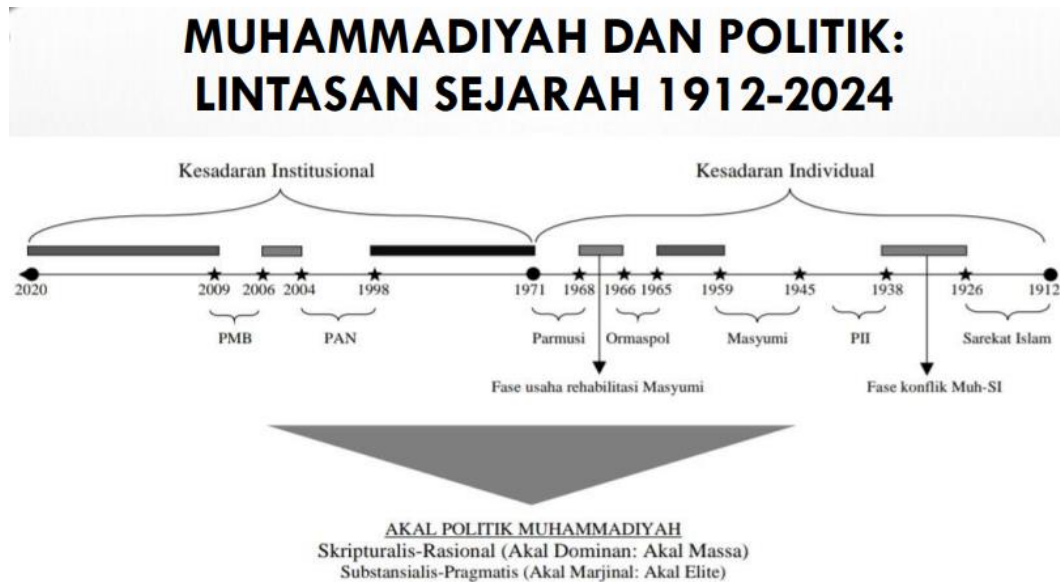
partai, partai politik butuh kemampuan untuk responsif. Sehingga dapat mendengar serta menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pemilih. Artinya memelihara dan membangun hubungan antara partai politik dengan masyarakat sangat penting dijaga untuk kelangsungan dan keberlanjutan partai politik (Djusfi, 2019).

Salah satu perangkat penting yang menjadi pilar demokrasi adalah partai politik. Kelompok ini memiliki peran penting untuk menjadi perantara hubungan pemerintahan dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kelompok politik menjadi akses masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Budiardjo (2008) berpendapat bahwa partai merupakan kelompok yang terorganisir yang bersatu karena keyakinan tertentu. Mereka berupaya untuk mengumpulkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada di pemerintahan dengan perantara pemilihan umum untuk menjalankan alternatif kebijakan yang sudah mereka bentuk. Alternatif tersebut adalah perpaduan dari berbagai kepentingan masyarakat. Partai dapat mencari dan mempertahankan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki dengan jembatan pemilihan umum atau cara lain yang disepakati. Maka simbiosis mutualisme antara kelompok politik dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Karena kelompok elitlah yang menjadi pemain tunggal dalam politik, daya saing dan negosiasi. Menurut Apter dan Rohanah partai politik memberikan peluang bagi elit untuk dapat dekat dengan masyarakat dalam jumlah yang besar (Ramadhanti, 2018).

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat yang memiliki basis massa yang sangat besar. Muhammadiyah sendiri memiliki kemajuan dan perkembangan yang pesat. Sumbangsih Muhammadiyah kepada masyarakat bahkan hingga ke negara sangatlah banyak, salah satunya adalah pendidikan (Zarro et al., 2020). Begitu juga dengan dunia politik. Antara Muhammadiyah dengan politik memiliki hubungan yang terjadi dengan dinamis. Hal tersebut terbukti dengan adanya keikutsertaan Muhammadiyah dengan partai politik disaat usianya mendekati satu abad. Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, pada tanggal 7 November 1945, sebuah organisasi yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau terkenal dengan istilah Masyumi bergabung dan berubah menjadi sebuah partai politik. Dimana partai Masyumi tersebut di didirikan di Gedung Muallimin Muhammadiyah yang terletak di kota Yogyakarta bersama dengan

Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam serta Persatuan Umat Islam lainnya yang juga menjadi anggota istimewa Masyumi (Ibrahim, 2021).

Gambar 1. 1 : Sejarah Muhammadiyah Dengan Politik



(Sumber: Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah)

Pada saat Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo telah terputuskan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup (MKCH). Matan tersebut lahir sebagai kelanjutan dari Mukhtar yang telah dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 1968. Mukhtar tersebut terjadi dengan tema salah satunya adalah dengan menunjukkan khittah perjuangan dari Muhammadiyah itu sendiri. Mukhtar tersebut dilaksanakan pada masa orde baru dimana saat itu masih terdapat kebijakan untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh politik dalam suatu aspek kehidupan dan juga deideologis dimana pemerintah saat itu berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh ideologi dalam suatu aspek kehidupan, lembaga, atau sistem. Salah satu hasil yang dimunculkan dari MKCH yang berkaitan dengan politik adalah Muhammadiyah menyerukan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk berusaha menjadikan negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'ala dengan konsep negara yang adil dan makmur, dan berjalan secara “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*” (Muhammadiyah, 2020).

Khittah politik Muhammadiyah jelas menyatakan bahwa organisasi tersebut bukanlah organisasi yang bergerak di bidang perpolitikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammadiyah juga bersifat situasional pada persoalan politik.

Mereka cakap terhadap situasi politik dan melihat seperti apa kontestasi politik yang ada dimana kemudian mereka bisa mengambil sikap. Muhammadiyah tidak ingin terikat pada partai politik secara organisasi. Menurut Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Khittah Ujung Pandang tahun 1971 menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan organisatoris dan juga tidak berafiliasi dengan partai politik. Keputusan Mukhtamar 1978 yang dilakukan di Surabaya juga menyatakan bahwa mereka bersifat independen dan berwenang mengatur rumah tangga dan kaidahnya sendiri.

Pada khittah yang dilaksanakan di Denpasar pada tahun 2002, menyatakan bahwa Muhammadiyah memposisikan organisasinya berada di dalam kelompok kepentingan (*Interest Group*) atau juga bisa dikatakan sebagai sebuah kekuatan moral (*Moral Force*). Kemudian dalam acara Mukhtamar yang dilaksanakan di kota Surakarta pada tahun 2022 silam, juga terdapat pembahasan serupa mengenai posisi Muhammadiyah dalam dunia politik. Terdapat beberapa keputusan yang ditujukan untuk Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik. Antaranya adalah LHKP tiap daerah diminta untuk mengoordinasikan proses rekrutmen kader Muhammadiyah yang ingin maju ke lembaga negara seperti Legislatif, Eksekutif dan lain sebagainya. Kemudian juga diharapkan pada tiap daerah terdapat kader Muhammadiyah yang turut berjuang dalam lembaga Pemerintahan atau lembaga Non-Pemerintahan yang dibarengi dengan forum atau jaringan kader yang ditujukan sebagai wahana untuk dakwah Islam yang berkembang dalam bidang politik dan kebangsaan (LHKP, 2024).

Namun pada kenyataannya, Muhammadiyah tidak hanya terlibat dalam dunia politik ketika Partai Amanat Nasional lahir saat orde baru. Jauh sebelum itu pada tahun 1967 terdapat anggapan bahwa Muhammadiyah memiliki keterlibatan cukup penting dalam berdirinya Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Bahkan sebelum itu, Muhammadiyah juga pernah bergabung pada Partai Masyumi. Muhammadiyah terkenal dengan massanya yang pada umumnya berasal dari golongan intelektual. Sehingga umumnya dukungan dari Muhammadiyah diberikan pada kadernya yang terjun ke dalam dunia politik khususnya dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional. Pada tingkatan nasional, massa Muhammadiyah.

Jumlah massa Muhammadiyah di Indonesia mencapai angka 30 Juta lebih. Meskipun demikian kenyataannya keberadaan mereka belum membuahkan hasil yang maksimal pada suara PAN dalam pemilu tahun 1999, 2004 hingga 2009. Justru pada tahun 2009 suara Partai Amanat Nasional mengalami penurunan secara nasional. Hal tersebut menjadi sebuah tanda bahwa strategi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional tidak maksimal dilaksanakan. Kuasa elit Partai Amanat Nasional mengakibatkan kemungkinan yang besar bagi kader Muhammadiyah untuk terjun kedalam dunia politik melalui PAN. Bahkan diluar kader Muhammadiyah dirasa sulit untuk bergabung dengan PAN. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa warga Muhammadiyah menjadikan keberadaannya sebagai jembatan dalam hal perpolitikan (Prihandini, 2014).

Hubungan simbiosis mutualisme merupakan hal yang wajar terjalin antara masyarakat dengan partai politik. Simbiosis mutualisme yang sering terjadi antara masyarakat dengan partai politik adalah seperti elit partai politik yang mengadakan kegiatan di masyarakat. Seperti kegiatan bakti sosial, pemberdayaan masyarakat hingga pemberian bantuan fasilitas di berbagai sektor yang ada di masyarakat. Upaya tersebut bukan sebagai pemberian yang cuma-cuma. Melainkan, dibalik itu pasti terdapat kepentingan dan kesepakatan antara masyarakat dengan partai politik itu sendiri. Pola hubungan tersebut lahir karena kepentingan partai politik dan kepentingan masyarakat. Terdapat kemungkinan yang sangat besar adanya “upah dan hadiah” antara partai politik dengan masyarakat. Dikutip dari Susilo (2006), George C. Homans berpendapat bahwa transaksi yang terjadi tidak hanya berupa uang, namun juga dapat berupa barang seperti penerimaan, kerelaan, martabat, cinta, perasaan dan lain-lainnya yang bukan berupa barang berbentuk fisik atau materialis (Liata, 2020).

Dinamika hubungan yang tidak harmonis lahir karena adanya ketidakpuasan masyarakat sebagai respon atas kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Konflik sendiri diartikan sebagai sebuah benturan atau gesekan yang terjadi akibat dari banyaknya paham, perkelahian serta perlawanan dari individu maupun kelompok orang dan lain sebagainya. Konflik dalam politik seringkali muncul karena perbedaan keyakinan atau ideologi. Hal tersebut terjadi karena

perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakpastian di politik (Ismail et al., 2024).

Partai Amanat Nasional merupakan partai yang digagas oleh beberapa tokoh. Yaitu salah satunya adalah Amien Rais. Namun, terdapat konflik internal yang terjadi dalam rumah tangga PAN. Terlebih pada tahun 2019 setelah kongres PAN menyatakan bahwa Zulkifli Hasan menjadi ketua umum. Konflik tersebut disinyalir melibatkan Amien Rais dengan Zulkifli Hasan. Dimana, keduanya memiliki perbedaan prinsip. Amien Rais berprinsip untuk menjadi oposisi Joko Widodo dalam pemilu 2019. Sedangkan Zulkifli Hasan menyatakan untuk mendukung Joko Widodo pada pemilu 2019 tanpa syarat. Keluarnya Amien Rais disebabkan karena ketidaksetujuannya terhadap sikap politik yang diambil oleh Zulkifli Hasan tersebut. Amien Rais juga dianggap sebagai pengganggu tatkala PAN ingin merapat ke barisan pendukung Jokowi (Wardani, 2021).

Hubungan PAN dengan Muhammadiyah di Ponorogo sudah terjadi cukup lama. Hubungan antara keduanya bersifat dinamis. Pada periode pertama berdirinya Partai Amanat Nasional tidak langsung mendapatkan atensi yang signifikan dari warga Muhammadiyah. Pada periode berikutnya barulah partai ini mendapatkan atensi dari masyarakat. Atensi tersebut didapatkan karena kuatnya sosok Amien Rais yang menjabat dan sebagai pendiri Partai Amanat Nasional. Begitu Amien Rais mendirikan partai baru, warga Muhammadiyah yang fanatik akan ketokohnya turut kembali mengikuti kemana beliau berdiri. Seperti halnya di daerah, pada periode awal berdirinya PAN hanya mendapatkan 3 kursi DPRD. Kemudian pada periode berikutnya mendapatkan 4 kursi. Di dua periode berikutnya meningkat menjadi 6 kursi. Sehingga hal tersebut menandakan adanya kondisi yang baik antar keduanya. Barulah ketika periode 2019 dan 2024 mengalami penurunan kursi. Dimana hal tersebut disebabkan oleh keluarnya 3 figur PAN ke partai lain (Wawancara Jusuf Harsono, 27/01/2025).

Pada masa sekarang ini justru hubungan antara keduanya dikatakan kurang baik. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya hubungan yang baik antara kader PAN dengan Muhammadiyah. Walaupun kader itu sendiri adalah juga salah satu warga dari Muhammadiyah. Namun hubungan yang fluktuatif tersebut bisa saja terjadi antara keduanya. Hubungan politik yang tidak harmonis tersebut disebabkan

karena komunikasi yang kurang terpelihara. Sehingga mereka yang masih menjaga hubungan baik dengan warga maupun pengurus Muhammadiyah masih eksis di partai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu kader PAN yang keluar dan pindah ke partai lain, yaitu Pak Narto yang mana hingga sekarang masih tetap eksis menjadi anggota dewan. Hal tersebut dikarenakan beliau masih menjaga baik komunikasi dan hubungannya dengan warga sekaligus pengurus Muhammadiyah daerah Ponorogo. Sehingga di daerah lebih didominasi oleh bagaimana figur daerah itu merawat dan menjaga komunikasinya dengan Muhammadiyah (Wawancara Jusuf Harsono, 27/01/2025).

Perolehan kursi legislatif dari Partai Amanat Nasional mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Ponorogo (Ponorogo, 2013), pada periode 2009 – 2014, Partai Amanat Nasional memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Ponorogo sebanyak enam (6) kursi. Kemudian pada periode 2014 – 2019, Partai Amanat Nasional kembali mendapatkan jumlah kursi sebanyak enam (6). Masalahnya di tahun berikutnya, pada periode 2019 – 2024, Partai Amanat Nasional mengalami penurunan jumlah kursi yang signifikan. Pada periode tersebut, PAN hanya mendapatkan 3 kursi saja.

Tabel 1.1 Data Perolehan Suara Legoslatif Kab. Ponorogo 2012

Daerah Pemilihan Constituency	Jumlah Keanggotaan DPRD Number of Members in Parliament					
	PDI-P	Golkar	Demokrat	PKB	PAN	Hanura
1	2	3	4	5	6	7
I	1	2	1	2	1	-
II	1	2	1	1	1	1
III	2	1	1	1	1	1
IV	2	2	2	1	1	-
V	2	1	1	1	1	-
VI	2	1	1	1	1	-
Jumlah/Total	10	9	7	7	6	2

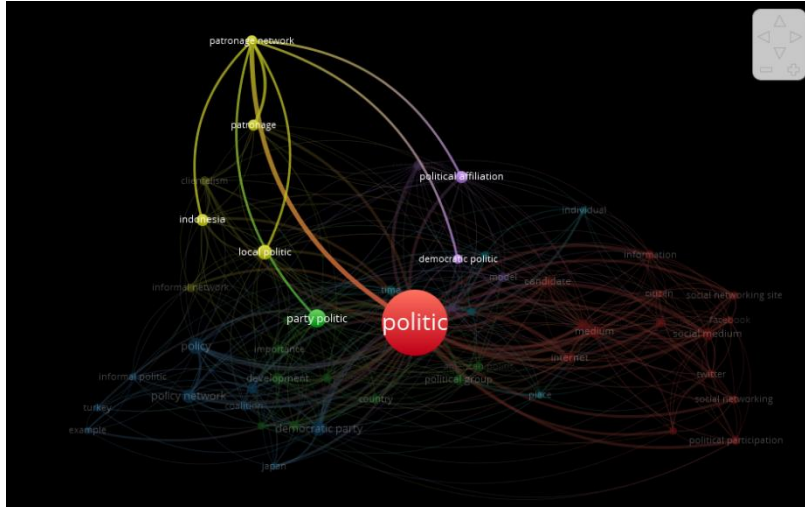
(Sumber Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2013)

Muhammadiyah meskipun memiliki jumlah anggota dan kader cukup banyak di Kabupaten Ponorogo, kenyataannya Muhammadiyah bukan menjadi organisasi mayoritas. Akan tetapi, dalam realisasinya Muhammadiyah selalu menjadi salah satu organisasi yang suara masanya berpengaruh pada perolehan suara kandidat pemilu di Kabupaten Ponorogo. Kendati demikian justru suara yang diperoleh oleh kader Muhammadiyah maupun oleh para elit Muhammadiyah dalam pertarungannya di dunia politik tidak begitu maksimal didapatkan (Harsono, 2018).

Begitu juga pada tahun 2024 – 2029. PAN juga mendapatkan 3 kursi legislatif saja. Artinya, terdapat indikasi ketidak harmonisan antara PAN dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Karena, massa dari Partai Amanat Nasional dapat dikatakan sebagian besar dari warga Muhammadiyah. Sebab, Partai Amanat Nasional sendiri lahir dari orang Muhammadiyah. Namun kenyataannya, suara dari PAN berkurang. Terdapat kecurigaan tentang terpecahnya suara massa Muhammadiyah ke beberapa partai maupun ke kandidat di luar Partai Amanat Nasional.

Hal tersebut terjadi karena terdapat indikasi bahwa suara massa Muhammadiyah terpecah. Selain karena salah satu pendirinya keluar dan mendirikan partai sendiri, Muhammadiyah memiliki prinsip yang modernis. Dimana, partai politik yang dekat dan menjunjung nilai-nilai keislaman akan diterima dengan baik oleh massa Muhammadiyah. Dalam hal ini, PAN, PKS, Gerindra dan UMMAT menjadi sebagian partai yang menjunjung nilai-nilai keislaman. Maka terdapat indikasi bahwa suara massa Muhammadiyah terpecah ke berbagai partai yang berpegang teguh pada prinsip Islam. Muhammadiyah memiliki semangat islam yang menjunjung kemurnian islam dengan modernisasi yang mengikuti perkembangan zaman. Organisasi masyarakat ini menekankan modernisasi pemikiran serta pendidikan dan menerima ilmu pengetahuan barat yang dikembangkan lewat berbagai sektor salah satunya pendidikan (Huda, 2012).

Gambar 1. 2. Research Gap



(Sumber: Diolah melalui VosViewer)

Penelitian ini berusaha untuk menggali dan mendalami hubungan yang sebenarnya terjadi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui Google Scholar dan telah dilakukan analisis data dengan VosViewer, dalam kurun waktu 2014-2024 terdapat 870 penelitian yang berupa jurnal dan buku terkumpul sebagian besar membahas mengenai social network dan political participation. Sedangkan penelitian yang membahas mengenai patronage network hanya berjumlah 19. Dan belum ada yang membahas mengenai jaringan politik antara Partai Amanat Nasional dan Muhammadiyah di Ponorogo. Maka penelitian ini berpotensi untuk menciptakan hasil yang belum ada sebelumnya. Bahkan, penelitian yang mengerucut kepada hubungan partai politik dengan organisasi masyarakat juga belum banyak diteliti. Maka, penelitian ini berpeluang besar menemukan *novelty*.

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda dari elit Partai Amanat Nasional Kabupaten Ponorogo. Sudut pandang yang pertama, Sugiarto menjelaskan bahwa sebelum tahun 2019 PAN dengan Muhammadiyah memiliki hubungan yang manis. Meskipun, terdapat partai lain yang juga hadir dalam pemilu dan partai tersebut yang juga di motori oleh Muhammadiyah. Sugiarto mengakui bahwa beberapa waktu terakhir antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah mengalami dinamika hubungan yang kurang baik. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kader dari Muhammadiyah yang memutuskan

untuk bergabung dengan partai politik di luar Partai Amanat Nasional (PAN). Kendati demikian, beliau menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang lumrah dan wajar di dalam politik (Wawancara Sugiarto, 14/05/2024).

Sedangkan sudut pandang yang ke-dua, menurut Bambang Triono hubungan antara PAN dan Muhammadiyah harmonis. Karena, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) hingga ranting di PAN Ponorogo adalah kader Muhammadiyah. Walaupun belum pasti orang Muhammadiyah memilih PAN. Bambang Tri menyatakan dinamika hubungan politik yang renggang antara PAN dengan Muhammadiyah tidak disebabkan karena terdapat perbedaan antara kedua kelompok namun karena adanya kepentingan kekuasaan saja. Beliau menjelaskan bahwa turunnya perolehan kursi di tingkat daerah Ponorogo disebabkan karena orang Muhammadiyah tidak fanatik terhadap partai. Namun, suara masyarakat lebih dominan ditentukan oleh individu kandidat atau elitnya. Ketika elit yang disukai keluar dan berpindah ke partai lain, maka massanya akan mengikuti kemana elit tersebut berpindah dan memberikan suaranya kepada elit itu sendiri. Sehingga, menurutnya konflik yang terjadi bukan antara Partai dengan Muhammadiyah namun konfliknya adalah PAN dengan individu (Wawancara Bambang Triono, 17/05/2024).

Penelitian terdahulu menjadi acuan perbedaan penelitian baru dengan penelitian selanjutnya, serta juga sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian lainnya. Pada penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas spesifik mengenai hubungan secara langsung antara partai politik dengan organisasi tertentu. Penelitian ini berupaya untuk memecahkan hubungan antara Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah melalui kacamata patron klien. Penelitian ini dilakukan hanya di ruang lingkup wilayah Kabupaten Ponorogo saja. Dan terfokus pada dua aktor, yaitu Partai Amanat Nasional dan Muhammadiyah. Penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan teori politik, sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan teori *Patron Client*. Sehingga, penemuan yang diangkat dapat dipastikan akan memiliki novelty dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Dengan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan memecahkan pertanyaan mengenai “Bagaimana Jaringan Politik *Patron-Client* Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo pada Pemilu Legislatif tahun 2024?”

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang Hubungan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo Pada Tahun 2024 ini memiliki tujuan untuk:

1. Memahami jaringan politik Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo pada pemilu legislatif 2024
2. Memahami jaringan politik antara Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo melalui kacamata *Patron-Client*.
3. Menganalisis pemberian yang diberikan PAN kepada Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai ini memiliki dua bentuk manfaat yang terbagi antara lain :

1.4.1. Secara Akademis

Harapan yang lahir atas penelitian ini adalah dapat menambah keilmuan dan pengetahuan mengenai hubungan yang terjadi umumnya antara partai politik dengan organisasi masyarakat, dan khususnya hubungan yang terjadi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Karena penelitian mengenai hubungan yang dimiliki antara sebuah partai politik dengan organisasi masyarakat masih sangat jarang dilakukan. Maka pengetahuan dan wawasan yang muncul dari penelitian ini diharapkan dapat dipelajari dan dipahami bersama akademisi.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk partai politik supaya memperhatikan dan peka terhadap keinginan dari masyarakat khususnya yang ada di Ponorogo. Sebab hal yang dirasa biasa saja dan tidak dianggap serius oleh elit politik atau oleh partai politik terkadang sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi pengetahuan bagi partai politik maupun organisasi masyarakat agar saling memahami satu sama lain dan menjaga keharmonisan supaya hubungan tetap berjalan dengan baik.

1.5. PENEGASAN ISTILAH

1.5.1. Disruption

Disruption atau disrupsi dalam dunia politik mengacu pada proses mengenai struktur, sistem, dan fenomena politik di lapangan ditantang atau diubah, yang pada akhirnya seringkali mengakibatkan perubahan besar yang terjadi dalam pemerintahan, dinamika kekuasaan, serta perubahan pada norma-norma sosial. Lain halnya dengan reformasi atau evolusi yang pada prosesnya tidak instan atau bertahap, disrupsi politik dicirikan oleh sifatnya yang disruptif dan transformatif. Bahkan, disrupsi sering kali di desak oleh gerakan dari bawah, perkembangan teknologi, hingga berubahnya perspektif publik.

1.5.2. High Politics

High Politics merupakan sikap politik Muhammadiyah yang memposisikan dirinya sebagai kelompok non-politik tapi bukan kelompok anti-politik. Sebab, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bukan bergerak di bidang keagamaan saja. Akan tetapi, Muhammadiyah juga mencakup segala lini kehidupan termasuk politik. Hal tersebut termaktub pada Khittah Denpasar 2002. Konsep ini menggambarkan bahwa Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut terhadap politik, akan tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah menempatkan dirinya untuk dapat melakukan desakan apabila terjadi ketidakadilan dan mendesak pemerintah untuk menegakkan nilai demokrasi dan transparansi.

1.5.3. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar Ma'ruf Nahi Munkar memiliki arti menyuarakan kebaikan dan mencegah keburukan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menerapkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam dunia politik. Muhammadiyah senantiasa mengajak pada kebaikan dan mencegah perilaku yang buruk. Muhammadiyah selalu mengajak umat untuk menjalankan politik dengan penuh kejujuran dan dengan menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

1.5.4. Ijtihad Politik

Ijtihad Politik dari Muhammadiyah merupakan sikap yang diambil oleh Muhammadiyah dalam perpolitikan di Indonesia. Ijtihad Politik Muhammadiyah disampaikan pada Khittah Denpasar tahun 2002. Dalam khittah tersebut, terdapat beberapa poin yang disampaikan, antara lain :

- a. Muhammadiyah menyadari perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan melalui dua strategi dan bidang perjuangan. Pertama, melalui aktivitas politik praktis yang mengarah pada kekuasaan seperti yang dilakukan oleh partai politik. Kedua, melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan politik tidak langsung (*high politic*).
- b. Muhammadiyah memilih strategi dan bidang perjuangan yang kedua di atas, dengan alasan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik praktis. Apalagi pilihan tersebut lebih sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, yakni mewujudkan masyarakat Islami yang sesungguhnya.
- c. Muhammadiyah meyakini politik merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan duniawi (*al-umur ad-dunyawiyah*) dan memandang peran politik sebagai bentuk dakwah amar makruf nahi mung. Peran tersebut dapat dilakukan dengan secara aktif mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa.
- d. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan keorganisasian dengan kekuatan atau organisasi politik manapun, namun demikian Muhammadiyah tetap bersikap positif dalam urusan politik dan memberikan kritik sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar agar sistem politik negara berjalan demokratis dan beradab.
- e. Muhammadiyah mengajak setiap anggota Persatuan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, dengan penuh rasa tanggung jawab,

rasional dan kritis, sejalan dengan misi Muhammadiyah dan untuk kemaslahatan bangsa dan masyarakat.

- f. Muhammadiyah meminta kepada seluruh warganya yang bekerja di bidang politik untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan penuh amanah dan profesional serta sejalan dengan misi amar makruf nahi mung amar makruf nahi mung.
- g. Muhammadiyah menjalin kerjasama dengan pihak manapun berdasarkan asas untung-rugi dengan tujuan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan maju.

1.5.5. Masyumi

Masyumi merupakan partai yang pernah diikuti oleh Muhammadiyah. Dimana pada masa itu, organisasi masyarakat bersatu untuk mendirikan partai politik Masyumi ini. Satu-satunya partai politik yang pernah dilabui oleh Muhammadiyah hanyalah Masyumi. Setelah Masyumi selesai, Muhammadiyah mengaku bahwa mereka tidak berafiliasi dan terikat dengan partai politik manapun.

1.5.6. Broker

Broker merupakan perwakilan atau seseorang yang ditunjuk oleh kandidat atau politisi tertentu yang berada di suatu wilayah. Fungsi dari broker sendiri adalah sebagai penjembaran antara masyarakat dengan kandidat. Selain itu, broker juga dapat melakukan negosiasi dan kesepakatan atas patronase dan klientelisme yang akan diberikan oleh kandidat atau politisi tertentu. Pada umumnya, broker adalah ketua RT, ketua RW ataupun seseorang yang memiliki kuasa di suatu wilayah tertentu. Broker pada umumnya memiliki kekuatan dan disegani oleh masyarakat. Sehingga masyarakat mau mengikuti instruksi dari broker tersebut.

1.5.7. Klien

Dalam konteks ini, klien merupakan mereka yang diberikan janji-janji oleh kandidat atau politisi tertentu. Klien pada umumnya dijanjikan akan diberikan sebuah kekeluasaan atau dijanjikan kebermanfaatan tertentu supaya klien tersebut dapat menjalankan kepentingannya dan kandidat juga mendapatkan dukungan suara dari klien itu sendiri. Klien dapat dikatakan

sebagai masyarakat, pengurus dan anggota organisasi tertentu hingga pimpinan dari perusahaan tertentu.

1.5.8. Elit

Dalam hal ini, elit dinyatakan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan atau power dalam partai politik. Elit memiliki kekuatan yang sangat besar meskipun dalam kelompok yang kecil. Sehingga elit dapat memengaruhi dan bahkan mengendalikan sekelompok masyarakat. Elit dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Supaya keinginan dan kepentingannya dapat tercapai.

1.5.9. Petahana

Petahana merupakan kandidat yang sebelumnya sudah menjabat sebagai pejabat atau elit tertentu yang kemudian pada periode berikutnya ia mencalonkan kembali dirinya supaya mendapatkan jabatannya lagi. Petahana merupakan kandidat yang memiliki kesempatan lebih besar untuk bermain di patronase pork barrel. Karena, petahana memiliki akses untuk menggunakan dana aspirasi yang dimiliki untuk dimanfaatkan seolah-olah dana tersebut diberikan dari kantong pribadi petahan kepada masyarakat.

1.5.10. *Political Package*

Political Package atau paket politik merupakan satu kesatuan calon anggota dewan atau calon legislatif bahkan eksekutif yang ditawarkan kepada masyarakat. Umumnya paket politik merupakan satu kader dari partai politik yang diberikan pada masyarakat supaya memilih paket-paket yang telah ditentukan. Paket politik dapat juga dengan partai yang berbeda. Umumnya paket politik juga ditawarkan ketika calon legislatif atau eksekutif berada pada satu koalisi yang sama.

1.6. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang topik maupun fenomena dan masalah yang selinier dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai rekam jejak atas penelitian atau studi yang sebelumnya telah dilakukan dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sedang atau akan dilakukan. Penelitian terdahulu

juga dapat menjadi salah satu acuan dan sarana pembeda antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang serupa.

Penelitian terdahulu digunakan untuk meminimalisir kemungkinan adanya duplikasi atau kesamaan antar penelitian dengan topik yang hampir serupa. Selain itu juga dapat digunakan untuk menilai dan melihat celah serta kekurangan dari penelitian yang lainnya sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengisi kekurangan dan mengembangkan pengetahuan dari topik yang serupa. Kendati demikian, pada intinya penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan antar penelitian sehingga dapat dilihat perbedaan dan kesamaan yang juga dapat diidentifikasi faktor apa yang menyebabkan adanya perbedaan dan kesamaan dari penelitian tersebut.

Gambar 1. 3: Penelitian Terdahulu



(Sumber: Diolah dengan Litmaps)

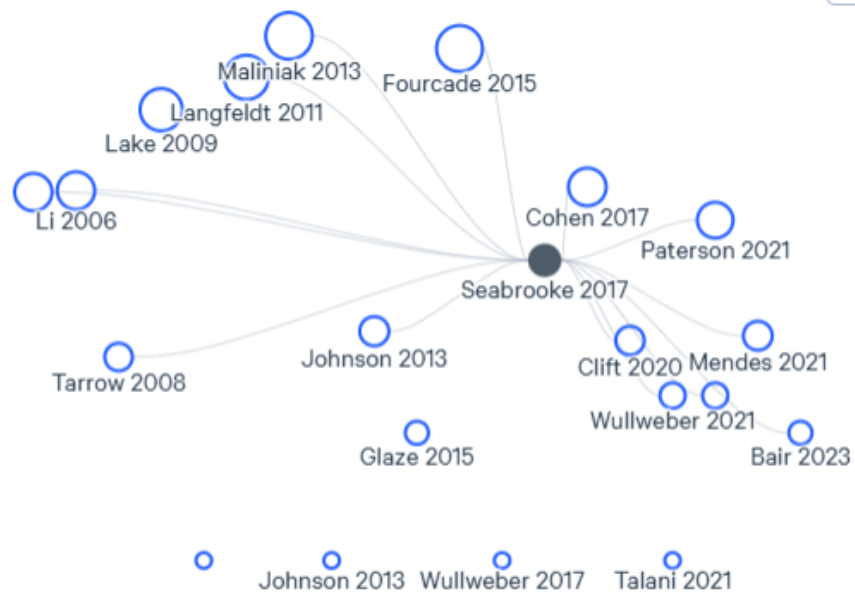
Dalam analisis yang dilakukan dengan menggunakan *Litmaps*, pada kata kunci *Patron Client in Politic* atau hubungan patronase dan klientelisme dalam dunia politik ditemukan sumber utama penelitian mengenai hubungan patron dan klien dalam politik ada pada penelitian Baghdasaryan (2017). Jaringan-jaringan yang terbentuk menunjukkan bahwa penelitian yang serupa juga dilakukan oleh beberapa orang. Dalam penelitian yang serupa terdapat perbedaan dan persamaan pada tiap penulisnya. Hal ini dapat menjadi salah satu acuan dari adanya penelitian terdahulu dari penelitian ini. Teori *Patron Client* juga digunakan pada banyak penelitian baik penelitian mengenai ekonomi maupun politik. Dalam penelitian ini, temuan pada

litmaps yang akan digunakan adalah penelitian yang terbit pada tahun 2014 hingga tahun 2024 saja.

Setelah penelitian Baghdasaryan (2017) ini menganalisis dampak hubungan patron-klien terhadap praktik hak-hak politik warga negara Armenia. Penelitiannya berfokus pada hak pilih dan kebebasan berpartai. Dalam studi kasus yang dilakukan menunjukkan bahwa jaringan klientelisme yang terstruktur dapat menyita prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan politik. Temuan ini menyimpulkan pentingnya mempertimbangkan aspek normatif dan deskriptif dalam memahami konsep kewarganegaraan politik dan mendesak perlunya upaya untuk mengatasi praktik-praktik klientelisme yang merugikan hak-hak warga negara.

Penelitian Baghdasaryan (2017) mengarah kepada penelitian yang terdekat yaitu Smith (2021), Iwuoha (2021) dan Ulzikri et al. (2021). Smith menyatakan bahwa di Uni Soviet realitas politik di lapangan seringkali lebih kompleks dan beragam daripada yang digambarkan oleh konsep-konsep umum seperti "kebijakan kebangsaan". Penelitian Iwuoha menyebutkan bahwa analisis hubungan patron-klien berupaya memahami bagaimana faktor-faktor politik mempengaruhi pengelolaan sektor minyak dan gas bumi di Nigeria. Fokus penelitiannya mencakup proses alokasi blok minyak, pengembangan proyek-proyek minyak, serta distribusi pendapatan minyak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan yang berbeda dari teori Wilson. Ulzikri berupaya mengkaji budaya politik warga NU di Bandar Lampung untuk melihat bagaimana mereka merespons pencalonan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga NU dari struktur organisasi memiliki tingkat partisipasi politik yang tinggi, sementara warga NU dari kalangan pesantren menunjukkan kecenderungan untuk beralih dari sikap pasif menjadi aktif. Faktor-faktor seperti pendidikan, karakter, dan nilai-nilai agama turut mempengaruhi partisipasi politik mereka.

Gambar 1. 4: Penelitian Terdahulu



(Sumber: Diolah dengan Litmaps)

Kemudian pada kata kunci yang kedua menggunakan *Political Network* atau hubungan dalam dunia politik. Kata kunci tersebut disajikan guna memperkuat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian Seabrooke (2017) merupakan penelitian yang membahas mengenai hubungan politik. Penelitian tersebut melahirkan beberapa penelitian yang juga membahas mengenai hal yang sama. Seabrooke & Young (2017) menjelaskan tentang bidang *International Political Economy* (IPE) terdiri dari berbagai kelompok yang saling berhubungan. Penelitiannya sangat beragam dan para ahli cenderung fokus pada topik-topik yang spesifik. Temuan pada penelitian ini mengindikasikan adanya dinamika yang menarik dalam komunitas IPE, di mana para ahli terus menciptakan area penelitian baru sambil tetap mengakui pentingnya dasar-dasar pengetahuan yang telah ada sebelumnya.

Penelitian lain yang ditemukan memiliki titik fokus kepada sektor ekonomi. Pada umumnya penelitian menggunakan teori *Patron Client* digunakan untuk penelitian sektor ekonomi. Sehingga banyak ditemukan penelitian ekonomi menggunakan teori ini. Dengan demikian bahwa dapat digunakan sebagai penguat bahwa teori ini belum banyak digunakan dalam penelitian di bidang politik dan pemerintahan. Bahkan penelitian mengenai hubungan Partai Amanat Nasional

(PAN) dengan Muhammadiyah di Ponorogo belum ada. Bahkan di tingkat nasional penelitian tentang keduanya belum ada yang menggunakan teori Patronase dan Klientelistik ini.

Dalam penelitian ini disajikan sedikitnya sepuluh (10) penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan. Namun dalam hal ini, akan disajikan juga apa yang menjadi pembeda antara 10 data penelitian terdahulu yang sudah terkumpul dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu tersebut, akan disimpulkan mengenai perbedaan-perbedaan dengan penelitian hubungan Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo pada Pemilu 2024. Dengan mengidentifikasi kembali sebuah penelitian terdahulu, peneliti diharapkan dapat memperkuat alasan mengapa membahas suatu permasalahan tertentu. Karena pada dasarnya penelitian memiliki tujuan untuk menghasilkan penemuan, membuktikan suatu permasalahan dan juga pengembangan dari hasil pengetahuan atau penemuan yang telah ditemukan (Ridwan et al., 2021).

Terdapat sedikitnya sepuluh (10) penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan. Kelompok pertama penelitian terdahulu dilakukan oleh (Sayari, 2014) dan (Antonius & Hidayat, 2016) membahas mengenai hubungan antar elit yang dimanfaatkan guna memenuhi kepentingannya dalam menarik suara rakyat. Kemudian kelompok penelitian yang kedua yang dilakukan oleh (Vogel, 2021) memiliki inti pembahasan tentang patronase yang sudah berdiri dan terjalin dengan kuat di suatu wilayah dapat mengakibatkan jaringan yang sangat sulit untuk disingkirkan atau diberantas. Sehingga patronase akan terus ada dan berkembang. Kelompok penelitian ketiga oleh (Berenschot & Aspinall, 2020) dan (Putra et al., 2022) Menyatakan bahwa klientelistik memiliki bentuk dan variasi yang berbeda di tiap negara dan terdapat dua jenis patronase, yaitu patronase yang dikendalikan oleh partai dan yang dipegang oleh rakyat. Elit dapat menggunakan perantara broker dalam hubungannya dalam menjalankan klientelisme.

Kelompok penelitian yang keempat dilakukan di Aftika Selatan oleh (Beresford, 2015) menyatakan bahwa patronase dan klientelistik yang terbentuk karena Memanfaatkan keadaan masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Kemudian kelompok penelitian kelima yang dilakukan oleh (Fathony & Mutiullah, 2024) dan (Sholikin, 2020) yang memiliki hasil penelitian mengenai gaya berpolitik

Muhammadiyah high politics atau cara berpolitik yang adiluhung dan memiliki nilai keluhuran moral tinggi. Dalam berpolitik Muhammadiyah juga memegang prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menjalankan politik dengan baik supaya tidak terjerumus kepada kesesatan serta ikut berperan aktif dan bijaksana. PAN didirikan dengan tujuan untuk membangun ijtihad politik oleh Amien Rais. Selain itu membahas mengenai hubungan Muhammadiyah dengan dunia politik yang tidak memiliki keberpihakan pada partai politik manapun. Kemudian penelitian dari Harsono & Nasution (2020) membahas mengenai paket politik yang lahir dari elit Muhammadiyah di Pemilihan Umum. Kemudian penelitian Kurniawan (2022) disebutkan bahwa elite Muhammadiyah di Ponorogo memiliki sikap netral terhadap partai politik. Sehingga penelitian tersebut relevan untuk dijadikan referensi penelitian terdahulu pada penelitian ini. Karena penelitian ini berupaya mendalami kembali hubungan antara PAN dengan Partai Amanat Nasional.

Penelitian terdahulu menjadi acuan perbedaan penelitian baru dengan penelitian selanjutnya, serta juga sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian lainnya. Pada penelitian sebelumnya tidak ada yang membahas spesifik mengenai hubungan secara langsung antara partai politik dengan organisasi tertentu. Penelitian ini berupaya untuk mendalami hubungan antara Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah. Penelitian ini dilakukan hanya di ruang lingkup wilayah Kabupaten Ponorogo saja. Dan terfokus pada dua aktor, yaitu Partai Amanat Nasional dan Muhammadiyah. Penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan teori politik, sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan teori *Patron Client*. Sehingga penemuan yang diangkat dapat dipastikan akan memiliki novelty dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1.7. LANDASAN TEORI

1.7.1. Teori *Patron Client*

Penelitian ini menggunakan teori konflik sosial yang digagas oleh James C Scott (1972), yaitu teori *Patron Client*. Dalam buku penelitian dari Edward dan Mada (2015), dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara Patronase dan Klintelisme. Shefter (1994) dalam buku tersebut mengatakan bahwa patronase merupakan pembagian keuntungan antara seorang politisi untuk menyalurkan sebuah keinginan pribadi tertentu uang diberikan pada pemilik suara untuk

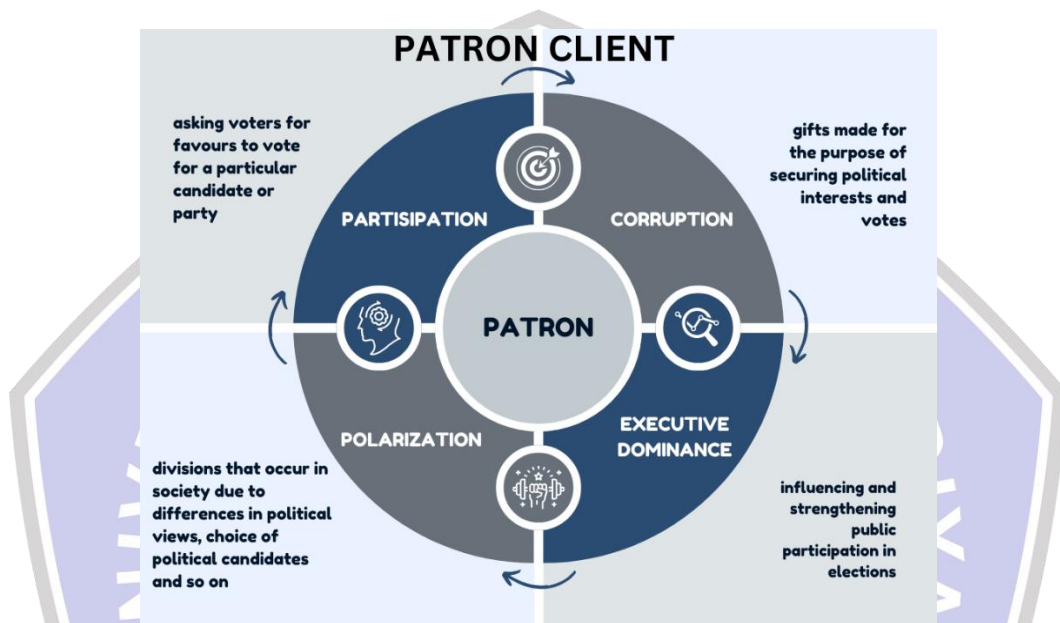
mendapatkan kepentingan dan dukungan politik dari masyarakat pemilih tersebut. Selain itu, patronase dapat juga diartikan sebagai pemberian uang, barang, jasa maupun keuntungan ekonomi yang lainnya seperti kontrak proyek atau pekerjaan yang diberikan oleh politisi kepada masyarakat pemilih atau kelompok komunitas tertentu. Sedangkan Klientelisme, menurut Hutchcroft (2014) merupakan sebuah kekuatan relasi kekuasaan yang lebih dekat dengan konteks individual atau personal antara kandidat dengan pemilik suara. Mudahnya, klientelisme merupakan relasi yang dibangun secara langsung atau tatap muka (face to face). Hicken (2011) dalam buku tersebut mengatakan setidaknya terdapat tiga hal mengenai klientelisme yaitu timbal balik, hierarkis atau penekanan pada relasi kekuasaan, dan aspek pengulangan atau keberlangsungan klientelistik yang berlangsung secara terus-menerus. Hubungan patronase dan klientelisme juga terjadi karena adanya hubungan emosional antara patron dengan klien (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Menurut Hall (1974) kata '*Patron*' adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Spanyol. Arti dari kata tersebut adalah pemilik kekuasaan, status, kewenangan dan pengaruh. Mudahnya Patron dapat diartikan sebagai majikan, pemberi sponsor atau bahkan seseorang atau sekelompok yang dapat melindungi yaitu seseorang atau sekelompok yang memiliki kekuasaan. Patron merupakan satu pihak yang memberikan bantuan dengan barang atau layanan lain kepada kliennya. Pada beberapa kasus *patronage* menjembatani individu yang lebih rendah pada lembaga nasional melalui birokrasi. Jaringan *patronage* juga merupakan sarana untuk mengarahkan suara partai. Sedangkan klien digunakan untuk memobilisasi dukungan massa atas dasar bantuan yang telah dijanjikan sebagai imbal balik atau imbalan dari suara yang di berikan.

Menurut Shefter (1994) yang dikutip dari Veenendaal (2019) menyatakan bahwa konsep hubungan antara patron-klien dikemukakan pertama kali oleh para peneliti di bidang antropologi dan sosiologi, yang meneliti suatu fenomena pada sebagian kecil masyarakat di Eropa Selatan dan Mediterania serta negara berkembang lainnya yang ada di belahan dunia non-barat. Mekanisme berjalannya patron klien adalah ketika klientelisme dijalankan pada masyarakat yang jumlahnya besar, maka masyarakat tersebut akan lebih bergantung pada jaringan-

jaringan hirarki yang cukup rumit. Mekanisme hubungan yang rumit harus melewati patron, broker dan klien. Maka dari itu, klientelisme lebih mudah untuk dijalankan ketika komunikasi dilakukan secara langsung dan tidak ada yang membatasi negosiasi antara politisi dan pemilik suara di masyarakat yang kecil. Maka dari itu, pada umumnya klientelisme berjalan pada masyarakat dengan skala yang tidak terlalu besar, dan di negara kecil hingga negara berkembang.

Gambar 1. 5: Teori Patron Client



(Sumber: Veenendaal 2019)

Terdapat empat (4) dimensi yang berkaitan dengan klientelisme, yaitu pertama *participation*, kedua *polarization*, ketiga *executive dominance*, dan keempat *corruption*. Semua dimensi dari teori ini saling berkesinambungan dan saling menjawab satu sama lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai dimensi Teori *Patron Client* yang digunakan dalam penelitian ini:

1.7.1.1. *Participation* (Partisipasi)

Partisipasi politik merupakan sebuah kedaulatan rakyat yang sangat fundamental pada sebuah sistem demokrasi. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi menandakan bahwa kemajuan politik dan demokrasi berjalan dengan jelas dan penuh kemajuan di Indonesia. Demokrasi tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti terdapat beberapa polemik dan permasalahan dalam terlibatnya masyarakat pada proses pemilihan dan pemberian suara dalam pesta demokrasi seperti pemilihan umum (Aneta et al., 2021).

Partisipasi politik di lingkungan masyarakat masih dianggap sebagai hal yang mudah. Masyarakat menganggap bahwa partisipasi politik hanya berupa memberikan suaranya pada kegiatan pencoblosan di pemilihan umum. Partisipasi merupakan sebuah ke sukarelaan masyarakat untuk ikut andil dalam keberhasilan proses pemilihan pejabat publik (Zarkasi & Rizal, 2020). Menurut Hirczy (1995) dan Zanella (1990), kekuasaan, keberpihakan, daya saing serta kedekatan masyarakat dengan para politisi atau kandidat tertentu menjadi salah satu permasalahan yang besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pemilihan umum. Termasuk juga hubungan patron-klien yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap banyaknya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Karena hubungan antara seorang individu dengan politisi atau kandidat tertentu juga menjadi faktor untuk masyarakat atau individu mendapatkan manfaat, barang dan jasa. Maka, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dipengaruhi oleh memperkuat faktor-faktor tersebut, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya kepada politisi dan partai tertentu yang sudah memberikan sesuatu padanya. Selain itu, pemungutan suara memiliki kerahasiaan yang tinggi. Akan tetapi, banyak dari politisi menggunakan cara tertentu untuk mengawasi dan memastikan suara yang diperoleh di tempat pemungutan suara tersebut aman. Pada umumnya, cara yang digunakan adalah dengan meminta bantuan pada pemilih untuk memberikan suaranya ke kandidat atau partai tertentu. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh kandidat maupun partai politik tertentu merupakan sebuah klientelistik. Dimana, politisi atau kandidat menggunakan berbagai macam cara untuk mengawasi dan memonitor partisipasi masyarakat (Veenendaal, 2019).

1.7.1.2. Polarization (Polarisasi)

Polarisasi terbagi menjadi dua hal, yang pertama polarisasi sebagai sebuah keadaan, yang kedua polarisasi sebagai sebuah proses. Dikutip dari DiMaggio et al., (1996), Polarisasi merupakan sebuah keadaan yang merujuk pada seberapa jauh permasalahan ditentang dalam lingkup beberapa paradigma. Sedangkan polarisasi dianggap menjadi sebuah proses yang mengacu pada meningkatnya oposisi dari waktu ke waktu. Dalam sebuah artikel, McCoy dan

Somer (2019) menjelaskan bahwa polarisasi merupakan sebuah proses dimana dalam perbedaan dan keberagaman di dalam elemen masyarakat semakin meluas, sehingga masyarakat meyakini bahwa politik dan masyarakat merupakan keadaan dimana masyarakat menjadi terpecah belah dan saling tidak percaya antara satu dengan yang lain. Sehingga kesimpulannya polarisasi politik adalah perpecahan yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan pandangan politik, pilihan kandidat politik dan lain sebagainya sehingga memunculkan perpecahan dan menimbulkan rasa tidak percaya serta permusuhan (Mansyur, 2023).

Ketegangan yang terjadi dalam politik acap kali menjadi kekerasan politik. Polarisasi terjadi karena adanya isu-isu agama, ideologi, bahasa hingga pilihan yang disukai. Dikutip dari Hirczy (1995), ia mengatakan bahwa dalam pemilu tidak hanya mempertaruhkan kontrol atas pemerintahan dan kekuasaan yang mengimplementasikan suatu kebijakan. Namun, yang dipertaruhkan juga dapat berupa keuntungan yang akan didapatkan atas jabatan yang diinginkan dan patronase (Veenendaal, 2019).

1.7.1.3. *Executive Dominance* (Dominasi Eksekutif)

Dominasi eksekutif atau dominasi dari elit atau petinggi merupakan sebuah ciri khas dari sebagian besar negara kepulauan, di mana pada umumnya pemerintah mengendalikan pasar kerja yang tidak proporsional. Dominasi eksekutif dapat mempengaruhi dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kemenangan dari partai atau kandidat tertentu pada sebuah pemilihan umum memiliki kemungkinan yang besar untuk dapat memegang kendali atau mendominasi. Namun sebaliknya, kekalahan dapat membuat partai atau kandidat hingga pendukungnya berpotensi kehilangan kekuasaan atau dominasi. Dalam hal ini, klientelisme dan patronase berperan cukup penting. Sebab, penunjukan kepada partisan kandidat atau partai dapat menguatkan kontrol dari partai atau kandidat yang berkuasa dan melemahkan lembaga-lembaga yang seharusnya bersikap netral atau tidak memihak pada kandidat dan partai tertentu (Veenendaal, 2019).

1.7.1.4. *Corruption (Korupsi)*

Kejadian korupsi di Malta memiliki keterkaitan dengan dominasi eksekutif. Lemahnya media dan lembaga yang mengawasi perihal korupsi sehingga informasi yang diberikan kepada para pemilih mengenai kasus korupsi dan pertanggungjawaban kandidat atau politisi tertentu masih kurang. Elit dapat membangun hubungan dengan para pebisnis sehingga dapat memperbesar kemungkinan memberikan tender atau pengadaan barang dan jasa antara keduanya. Mempertahankan hubungan patron-klien sangatlah sulit dengan dampak yang akan didapatkan apabila terjadi kerenggangan yaitu terganggunya finansial antar patron-klien. Meskipun klientelisme bukan menjadi satu penyebab yang bereaksi secara langsung, namun klientelisme menjadi sebuah gambaran nyata bagi pejabat yang korup. Klientelisme selain melahirkan rasa ketergantungan masyarakat secara sosial dan ekonomi kepada patron atau elit politik, juga dapat mengurangi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk bersifat kritis dan meminta pertanggungjawaban pada politisi yang melakukan tindak kejahatan korupsi. Bahkan, masyarakat mungkin saja memanfaatkan korupsi dari politisi untuk merubah keadaan mereka melalui celah klientelisme (Veenendaal, 2019).

Yang terjadi di Indonesia adalah dana aspirasi yang didapatkan oleh elit dan seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dibagikan dengan seolah-olah dana tersebut diberikan oleh individu elit tersebut. Karena, hanya elit yang bersangkutan yang dapat mengakses dana aspirasi tersebut. Dana tersebut diberikan dalam berbagai macam bentuk, dapat berupa bangunan, pemberian tunai dan bantuan dalam bentuk yang lainnya. Berdasarkan penelitian dari Edward dan Sukmajati, pemanfaatan dana aspirasi oleh elit hampir terjadi di seluruh Indonesia. Sehingga, pola korup dengan memberikan dana aspirasi yang berasal dari masyarakat dan diberikan kepada masyarakat kembali seperti seakan-akan dana tersebut berasal dari elit politik atau dengan stratefi lain yaitu menjanjikan pencairan dana aspirasi dalam jumlah yang besar dengan mudah (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Dalam penelitian ini Partai Amanat Nasional (PAN) berperan sebagai Patron. Sedangkan Muhammadiyah dipetakan sebagai Klien. Menurut Jusuf Harsono, PAN dikatakan sebagai Patron karena bagaimanapun juga, partai tersebut tidak akan bisa meninggalkan Muhammadiyah. Meskipun secara kedudukan tidak bisa untuk dibandingkan karena PAN merupakan partai dan Muhammadiyah merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas), namun orang Muhammadiyah memiliki pengaruh yang cukup signifikan kepada massa atau suara politik dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal tersebut terjadi karena faktor sosiologis historis. Sehingga PAN dikatakan sebagai patron. Karena PAN tidak akan mungkin eksis tanpa Muhammadiyah yang disebabkan karena adanya ikatan emosional. Hal tersebut menjadikan Muhammadiyah lebih berpengaruh daripada PAN. Karena tanpa Muhammadiyah partai ini tidak bisa berjalan. Sehingga intensitas hubungan dan komunikasi yang baik PAN kepada warga Muhammadiyah harus lebih diperhitungkan.

Menurut Jusuf Harsono, walaupun hubungan antara keduanya sangat dekat namun partai yang berperan sebagai patron ini tidak memiliki kewenangan untuk mengatur Muhammadiyah. Bentuk imbal balik dari organisasi masyarakat ini adalah dengan melakukan pengarahannya. Selain itu berdasarkan informasi yang beliau berikan, DPP PAN Zulkifli Hasan pernah menghubungi PDM Ponorogo untuk meminta pendapat. Artinya kedekatan antara PAN dengan PDM sangat luar biasa dekat. Namun tidak memiliki kewenangan atas Muhammadiyah, hanya sebatas koordinasi dan komunikasi saja. Sedangkan kekuasaan bersifat taktis. Yang terjadi dilapangan dapat beragam. Terkadang sering berada diluar kendali PDM (Wawancara Jusuf Harsono, 27/01/2025).

Sehingga penelitian ini ingin menunjukkan unit analisis yang digunakan adalah untuk mencari tahu bagaimana jaringan politik PAN sebagai patron yang ditujukan kepada Muhammadiyah sebagai klien dalam upaya untuk menjaga massa atau suara politik dari partai itu sendiri. sedangkan unit eksplanasi yang digunakan adalah mengambil kasus pada Pemilu Legislatif 2024 yang ada di Kabupaten Ponorogo.

1.8. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional pada penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana patronase dan klientelisme dapat berjalan dan mempengaruhi hubungan antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Terdapat dimensi yang menjadi sumber utama terjadinya patronase dan klientelisme yang berupaya untuk dianalisis pada penelitian ini. Terdapat beberapa dimensi dengan acuan data yang akan diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 2: Dimensi dan Data Yang Diperoleh di Lapangan

Dimensi	Data Yang Diperoleh
Participation	1. Keberpihakan massa Muhammadiyah kepada PAN 2. Kedekatan massa Muhammadiyah dengan kandidat dari PAN
Polarization	3. Berkurangnya suara PAN karena elitnya yang berpindah partai
Executive Dominance	4. Suara PAN bergantung kepada siapa tokoh atau elit Partai 5. Konsistensi pimpinan Muhammadiyah
Corruption	6. Janji politik PAN kepada Muhammadiyah 7. Pemberian PAN kepada Muhammadiyah

(Sumber: Didapat Dari Olah Data Penelitian)

Dari masing-masing dimensi, terdapat dua acuan yang dapat digunakan untuk mendalami hubungan antara PAN dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Dari dimensi *Participation* (Partisipasi), dapat dilakukan pendalaman informasi melalui acuan keberpihakan massa Muhammadiyah kepada PAN dan juga seberapa dekat massa organisasi masyarakat tersebut dengan kandidat atau elit dari partai PAN. Partisipasi masyarakat dalam hal tersebut menjadi acuan yang utama apakah benar partisipasi dari massa Muhammadiyah dapat memberikan dampak kepada suara PAN di Kabupaten Ponorogo.

Polarization (Polarisasi) menjadi dimensi yang selanjutnya. Polarisasi dapat didalami informasinya dengan menggunakan dua acuan, yaitu turunya suara PAN akibat keluarnya Amien Rais dan akibat elit PAN yang berpindah ke partai lainnya.

Karena suara PAN di Kabupaten Ponorogo turun setelah Zulkifli Hasan menjabat sebagai ketua umum, dan Amien Rais menyatakan keluar dari PAN. Selain itu, turunnya suara PAN di Kabupaten Ponorogo disinyalir terjadi karena elit politik Partai Amanat Nasional yang pindah ke partai lain. Karena berdasarkan penuturan dari Bambang Triono yang diwawancarai sebelumnya, terdapat massa Muhammadiyah yang fanatik terhadap kandidat bukan kepada partainya.

Executive Dominance (Dominasi Eksekutif) memiliki dua acuan yang dapat digunakan untuk mendalami data yang dibutuhkan. Yaitu dengan acuan suara yang didapat oleh PAN sebenarnya bergantung kepada tokoh Muhammadiyah atau tidak. Kemudian apakah suara massa juga bergantung pada konsistensi pimpinan dari Muhammadiyah itu sendiri. Karena pada umumnya anggota dari suatu organisasi sebagian besar patuh dan ikut apa yang diputuskan oleh pimpinan atau tokoh di organisasi tersebut. Apabila pimpinan Muhammadiyah secara tidak langsung mengarahkan dukungan politiknya kepada kandidat yang ada di PAN, maka besar kemungkinan sebagian dari massa Muhammadiyah akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya, apabila secara tidak langsung pimpinan menyatakan dukungan kepada kandidat selain dari PAN, maka sangat memungkinkan massa juga mengikuti pimpinan tersebut.

Corruption (Korupsi) dalam hal ini juga memiliki dua acuan. Acuan yang digunakan adalah janji politik dan pemberian. Dimana pada umumnya partai politik yang dalam hal ini bertindak sebagai patron memberikan janji-janji tertentu kepada Muhammadiyah yang dalam hal ini dikatakan sebagai klien. Maka acuan yang ada akan mempertegas apakah PAN memberikan janji politik kepada Muhammadiyah. Selain itu, dalam hubungan patron-klien, dalam hal ini patron memberikan sesuatu untuk memenuhi kepentingan dari klien. Fapat memberikan barang dan layanan kepada klien dalam upaya mempertahankan atau menarik suara dari massa klien itu sendiri. Sehingga dalam hal ini apakah PAN menjanjikan suatu hal tertentu dan juga apakah PAN juga memberikan sesuatu kepada Muhammadiyah dalam upaya mempertahankan dan menarik suara dari massa Muhammadiyah

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dikenalkan dan digunakan pertama kali oleh antropolog dan sosiolog terdahulu di Indonesia untuk memecahkan suatu permasalahan pada awal abad ke-20. Penelitian kualitatif digunakan untuk menilai secara obyektif dan mendeskripsikan sebuah fenomena sosial pada masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi kasus serta analisa sejarah dan observasi (Yuliani, 2018). Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena pendekatan dengan metode kualitatif menggunakan metode kajian dengan mengarah pada kebenaran suatu kasus dengan sifat yang relatif atau tidak mengikat, hermenetik dan interpretatif. Karena, pendekatan penelitian kualitatif menggunakan data yang bersifat deskriptif dari daftar wawancara, hasil laporan pengamatan langsung di lapangan, transkrip wawancara serta catatan dari sebuah pengamatan yang kemudian di rangkum dan diperkuat dengan teori yang sesuai sehingga menghasilkan sebuah hasil analisis (Zaluchu, 2020).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena antara keduanya memiliki hubungan secara emosional. Penelitian berfokus kepada bagaimana jaringan politik yang terbentuk antara Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bentuk menjaga suara politiknya, yaitu suara dari warga Muhammadiyah.

1.9.3. Informan/Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang mejadi fokus penelitian atau menjadi pihak yang di teliti pada sebuah penelitian. Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Partai Amanat Nasional. Karena partai tersebut merupakan pihak *Patron* dalam penelitian, sedangkan Muhammadiyah merupakan pihak *Client*.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penentuan informan snowball. Snowball merupakan metode wawancara yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Dimana, penentuan informan dari teknik ini dilakukan dengan cara meminta informan pertama untuk merekomendasikan informan lainnya. Sehingga, data yang terkumpul dapat semakin kuat. Informan pertama akan merekomendasikan rekan atau koleganya yang dirasa berkompeten untuk memenuhi data penelitian (Parker et al., 2020).

Informan pada penelitian ini memiliki pengetahuan yang baik dan juga tergabung dalam dua organisasi yang diteliti, yaitu PAN dan Muhammadiyah. Sehingga informan yang dipilih memiliki informasi yang baik untuk dapat memenuhi keperluan data penelitian. Informan dari penelitian ini adalah mereka yang mengerti dan faham mengenai hubungan antara Partai Amanat Nasional dengan Muhammadiyah. Informan tersebut merupakan aktor yang tergabung di dalam Partai Amanat Nasional dan Muhammadiyah atau tergabung di salah satu organisasi tersebut, baik tergabung di Partai Amanat Nasional saja atau tergabung di Muhammadiyah saja. Informan tersebut dipilih karena dinilai gamblang dan terbuka dalam menyampaikan hubungan antara PAN dengan Muhammadiyah. Informan yang akan di wawancarai salah satunya adalah mereka yang tergabung di tingkat ranting. Karena pada umumnya, mereka yang berada di tingkatan kecil lebih terbuka dalam memberikan informasi.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data atau hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Menentukan teknik pengumpulan data merupakan aspek yang penting dan harus diperhatikan supaya mendapatkan data penelitian yang tepat. Dalam penelitian kualitatif, terdapat tiga metode pengumpulan data. Namun pada penelitian ini, hanya dua metode yang diterapkan. Yaitu wawancara dan dokumentasi (Ardiansyah et al., 2023).

1.9.4.1. Wawancara

Wawancara adalah interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh informan atau narasumber dengan pewawancara dalam rangka untuk

mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ingin di kumpulkan. Wawancara yang lebih baik adalah wawancara yang dilakukan secara langsung, dan mendengarkan dengan baik informasi yang diberikan oleh informan dengan tulus dan penuh rasa empati untuk membuat informan terbuka akan informasi yang penulis butuhkan (Harahap, 2019).

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa orang yang sudah dipertimbangkan dengan baik akan ke akuratan informasi yang informan tersebut miliki. Dan wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur. Sehingga, peneliti dapat mengembangkan informasi dengan baik apabila dalam pertanyaan yang diberikan kepada informan masih dirasa kurang jelas atau terdapat penemuan menarik dalam jawabannya. Selain itu, alat bantu perekam dari smart phone juga mempermudah penulis dalam mengingat, memastikan, mengulang dan mendalami jawaban yang narasumber berikan.

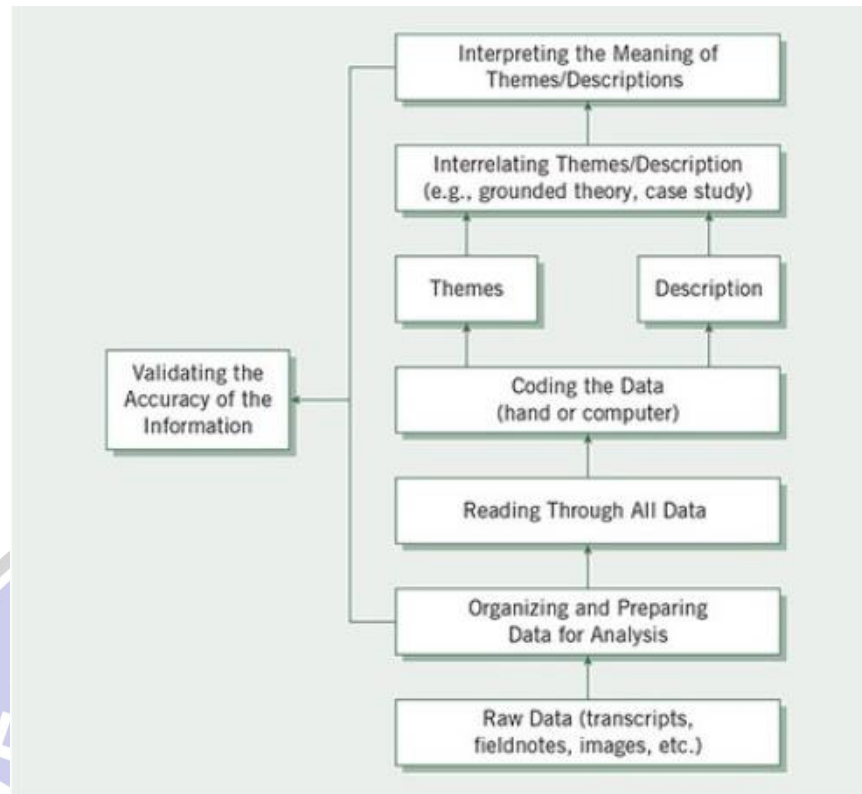
1.9.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pegumpulan data yang harus dilakukan dan dimiliki oleh peneliti. Dimana, dokumentasi dapat dikumpulkan dalam bentuk foto kegiatan, arsip atau dokumen yang dapat memperkuat penelitian, vidio, postingan di media sosial, dan bahan tertulis lainnya. Data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi digunakan untuk memperkuat atau membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Selain itu, data dokumentasi juga digunakan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh juga benar terjadi dan dilakukan oleh objek penelitian.

1.9.5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan satu bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Analisis data diperoleh dari hasil data yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan di lapangan. Data yang telah terkumpul harus dipilah sesuai dengan keperluannya. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis dari Creswell (2018). Dalam buku tersebut, dijabarkan secara detail bagaimana metode analisa data yang baik dalam penelitian kualitatif. Berikut tahapan yang akurat dalam melakukan analisis data:

Gambar 1. 6: Metode Analisis Data Creswell (2018)



(Sumber: Creswell 2018)

1.9.5.1. Mengelompokkan dan mempersiapkan data untuk di analisis

Dalam proses mengelompokkan dan mempersiapkan data dapat dilakukan dengan wawancara, memilah data yang didapatkan, menulis hasil turun ke lapangan, membuat katalog atau mengumpulkan data secara visual dengan melalui rekaman, video, gambar dan sebagainya, serta mensortir dan mengelompokkan data yang sesuai dengan kebutuhannya.

1.9.5.2. Membaca atau melihat keseluruhan data

Dalam proses membaca atau melihat data yang didapatkan, pertama kali adalah menyimpulkan secara umum gambaran dari data yang telah diperoleh untuk mendapatkan makna atau maksud dari data yang sudah terkumpul. Seperti apa yang disampaikan oleh narasumber dan apa pokok atau kedalaman informasi yang diberikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca dan melihat transkrip atau catatan lapangan.

1.9.5.3. Membuat coding pada data

Coding atau membuat kode pada data merupakan proses mengelompokkan data atau memberikan kode tertentu dengan memperhatikan kategori data tersebut. Seperti memberikan kode kepada nama tokoh dalam penelitian. Baik tokoh yang diteliti maupun informan. *Coding* diterapkan kepada data yang telah diambil dan dikumpulkan selama turun ke lapangan, mengelompokkan tulisan atau gambar dalam kategori tertentu, dan akhirnya memberikan kode atau label tertentu kepada kategori yang telah di buat.

1.9.5.4. Membuat deskripsi dan tema

Dengan menggunakan istilah atau kode yang dibuat dapat menghasilkan deskripsi mengenai orang yang menjadi informan dan kategori atau tema untuk di analisis. Deskripsi secara mendalam dan detail harus dilakukan mulai dari latar belakang informan, tempat dan lain sebagainya. Peneliti dapat menggunakan pengkodean dalam memberikan sub-bab pembahasan atas data yang telah diperoleh. Sub-bab tersebut harus menampilkan berbagai perspektif dari orang lain yang didukung dengan kutipan atau sitasi supaya membuktikan bahwa data tersebut valid. Dalam penelitian kualitatif dengan metode ini penulis dapat menghubungkan antara data satu dengan data lainnya apabila dirasa data tersebut memiliki hubungan, sehingga menghasilkan deskripsi yang membentuk hubungan sub-bab yang kompleks.

1.9.5.5. Merepresentasikan deskripsi dan tema

Setelah melalui proses sebelumnya, deskripsi dan sub-bab dapat dituliskan dalam bentuk narasi kualitatif. Karena, pendekatan yang paling baik untuk dilakukan adalah dengan menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan data yang sudah di analisis. Dapat dituangkan dengan menyebutkan kronologi fenomena yang diteliti, menyampaikan secara rinci dari hasil yang didapatkan lengkap dengan sub-tema, gambaran lengkap peristiwa, sudut pandang individu serta kutipan), atau hasil diskusi dari pembahasan yang saling berhubungan satu sama lain. Dapat juga dituangkan dalam bentuk grafik, gambar, tabel sebagai penguat data yang

diperoleh. Dapat juga menyertakan gambar lokasi penelitian dan menyampaikan informasi deskriptif mengenai informan dalam bentuk tabel.

1.9.6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya untuk menguji data yang didapatkan di lapangan tersebut adalah data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keahlian dalam menguji keabsahan data menjadi sebuah hal yang penting dimiliki oleh peneliti. Dalam artian, peneliti menjadi hakim untuk menentukan data yang dapat dipercaya. Peneliti dituntut untuk dapat menilai data yang shohih, kebenaran informasi, keterangan dan data lain yang disampaikan oleh informan.

Menurut beberapa ahli seperti Morse (2015), dan Whittemore et.al (2001) menyatakan bahwa validasi data merupakan teknik yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Namun, mereka berpendapat bahwa validasi juga cocok digunakan dalam paradigma umum dalam menyatakan kesimpulan penelitian menjadi masuk akal, adil dan memiliki alasan. Menurut Porter, pendekatan yang realistis sangat diperlukan dan ketelitian ilmiah juga harus dilakukan dengan serius pada penelitian kualitatif. Sehingga, validitas dan ketelitian diperlukan dalam penelitian kualitatif dan juga harus dimaksimalkan dalam proses penelitiannya. Menurut Sundler et al., (2019) terdapat tiga fenomenologi keabsahan data, yaitu reflektivitas, kredibilitas dan transferabilitas.

1.9.6.1. Reflektivitas (Reflexivity)

Refleksivitas merupakan sebuah metodologis yang bersifat reflektif dan mempertanyakan pemahaman awal seseorang. Reflektivitas mudahnya diartikan sebagai konsistensi dari peneliti yang harus dijaga. Peneliti dituntut untuk memahami data-data yang diambil di lapangan. Untuk memperkuat data, peneliti harus mengkonfirmasi dan mendalami data yang telah didapatkan sehingga tidak menerima data begitu saja. Untuk mempertahankan reflektivitas yaitu dengan cara membandingkan data asli yang didapatkan dengan data lainnya dengan pembahasan yang selaras.

1.9.6.2. Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas menurut Kitto et al., (2008), merujuk pada makna dan kebenaran data yang disajikan adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas dan reflektifitas merupakan dua hal yang tidak jauh berbeda dan saling berkesinambungan. Pada dasarnya, kredibilitas harus disajikan secara transparan atau sesuai dengan temuan yang ia dapatkan.

1.9.6.3. Transferabilitas (Transferability)

Transferabilitas merujuk kepada kegunaan, sumbangsih keilmuan dan relevansi keilmuan pada saat itu. Fenomenologi ini merupakan acuan penilaian apakah penelitian yang dilakukan dapat diterima dan dapat menambah pengetahuan baru. Dengan begitu, temuan pada penelitian harus bisa dimengerti dan dibagikan ke penelitian yang lainnya. Lebih dalam lagi, relevansi, kegunaan dan makna dari temuan penelitian terhadap konteks pembahasan yang lain adalah komponen yang penting.

